

Penguatan Pemahaman Politik Siswa melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila: Studi Kasus di SMA Sayyid Yusuf Talango Kabupaten Sumenep

Iqwan Homaidy^{1*}, Sunarso²

^{1,2}Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : iqwankh@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1445 - 1454

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3136>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3672>

Article History:

Received: 26-07-2026

Revised: 04-08-2026

Accepted: 04-08-2026

Abstract : *This study aims to analyze the implementation of political education through Pancasila Education, improving students' political understanding, and the challenges of its implementation at Sayyid Yusuf Talango High School, Sumenep. The study used a qualitative approach with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation with the principal, teachers, and students. The results indicate that political education is implemented through topics on democracy, the rights and obligations of citizens, and political participation, using discussion, debate, and election simulation methods. This learning enhances students' political understanding across cognitive, affective, and participatory aspects. Challenges include limited access to information and technological resources, low political literacy, and the suboptimal use of innovative learning methods.*

Keywords : *Civics, Pancasila education, Political education, Political lessons, Sayyid Yusuf Talango High School*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, peningkatan pemahaman politik siswa, serta tantangan pelaksanaannya di SMA Sayyid Yusuf Talango, Sumenep. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik diterapkan melalui materi demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi politik dengan metode diskusi, debat, dan simulasi pemilu. Pembelajaran ini meningkatkan pemahaman politik siswa pada aspek kognitif, afektif, dan partisipatif. Adapun tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan akses informasi, sarana teknologi, rendahnya literasi politik, serta kurang optimalnya penggunaan metode pembelajaran inovatif.

Kata Kunci : Pelajaran Politik, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Politik, SMA Sayyid Yusuf Talango

PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan salah satu instrumen penting dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan mengenai sistem politik, tetapi juga sebagai proses

pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan kewarganegaraan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan demokratis (Mulyadi *et al.*, 2019). Pendidikan politik menjadi semakin penting di tengah perkembangan masyarakat modern yang ditandai oleh meningkatnya kompleksitas persoalan publik, arus informasi yang semakin cepat, serta tuntutan partisipasi warga negara dalam berbagai proses pengambilan keputusan politik (Alscher, 2022).

Dalam konteks pendidikan formal, sekolah memiliki peran strategis sebagai agen sosialisasi politik bagi generasi muda. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, peserta didik diperkenalkan pada nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta bentuk-bentuk partisipasi politik yang bertujuan membangun karakter warga negara yang kritis, demokratis, dan bertanggung jawab (Sati & Dewi, 2021). Pendidikan Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai media penguatan identitas nasional, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran politik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan kebangsaan (Wahyuni, 2024).

Pentingnya pendidikan politik semakin relevan bagi siswa sekolah menengah atas karena mereka berada pada fase transisi menuju kedewasaan politik. Pada tahap ini, siswa mulai memiliki kemampuan berpikir abstrak, kesadaran sosial yang lebih berkembang, serta berpotensi menjadi pemilih pemula dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab untuk membekali siswa dengan pengetahuan politik, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan partisipatif agar mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan sosial (Denis Irwandi *et al.*, 2023). Pendidikan politik yang efektif akan membantu siswa memahami makna demokrasi secara substantif, menghargai perbedaan pendapat, serta memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan publik yang berkembang di masyarakat (Saputri *et al.*, 2024).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi politik generasi muda di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya minat terhadap isu-isu politik, keterbatasan akses terhadap informasi politik yang berkualitas, serta maraknya disinformasi melalui media digital menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya pemahaman politik di kalangan remaja (Bowyer & Kahne, 2020). Kondisi tersebut semakin kompleks pada wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan geografis dan infrastruktur pendidikan, termasuk daerah kepulauan yang memiliki akses informasi dan sumber belajar yang relatif lebih terbatas dibandingkan wilayah perkotaan (Zulfaida & Arifin, 2025).

Berdasarkan hasil observasi awal di SMA Sayyid Yusuf Talango Kabupaten Sumenep, ditemukan bahwa partisipasi siswa dalam kegiatan demokrasi sekolah masih relatif rendah. Sebagian siswa belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam forum musyawarah, organisasi sekolah, maupun kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bersama. Proses pembelajaran juga masih didominasi oleh pendekatan yang berpusat pada guru sehingga kesempatan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berdialog, dan mengemukakan pendapat secara demokratis belum sepenuhnya optimal. Selain itu, kondisi geografis Talango sebagai wilayah kepulauan turut memengaruhi akses siswa terhadap informasi politik, sumber belajar digital, serta pengalaman demokrasi yang lebih luas di luar lingkungan sekolah (Firdaus, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji peran Pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter demokratis, meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, dan memperkuat partisipasi sosial peserta didik (Alscher, 2022; Saputri *et al.*, 2024; Wahyuni, 2024). Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada konteks sekolah perkotaan atau sekolah yang memiliki akses pendidikan dan teknologi yang relatif memadai. Penelitian yang secara khusus

mengkaji implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila pada sekolah yang berada di wilayah kepulauan masih sangat terbatas. Selain itu, kajian terdahulu umumnya lebih berfokus pada hasil pembelajaran kewarganegaraan tanpa menjelaskan secara mendalam bagaimana proses pendidikan politik dilaksanakan dalam praktik pembelajaran serta bagaimana pengalaman demokrasi di sekolah berkontribusi terhadap penguatan pemahaman politik siswa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam memperkuat pemahaman politik siswa di SMA Sayyid Yusuf Talango Kabupaten Sumenep. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana strategi pembelajaran, pengalaman demokrasi sekolah, dan konteks sosial-geografis wilayah kepulauan berinteraksi dalam membentuk pemahaman politik siswa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan pendidikan politik di sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami implementasi penguatan pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Sayyid Yusuf Talango, Kabupaten Sumenep. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam kondisi alamiah (Creswell, 2018), sedangkan studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena dalam konteks nyata (Yin, 2018).

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru Pendidikan Pancasila, dan siswa, serta observasi kegiatan pembelajaran. Data sekunder diperoleh dari dokumen sekolah dan literatur ilmiah yang relevan (Sugiyono, 2018; Moleong, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik, sedangkan reliabilitas data dilakukan melalui peer review. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Jenis penelitian ini adalah etnografi, yaitu pendekatan yang mengkaji masyarakat dalam konteks sosial dan budaya secara alamiah (Creswell & Creswell, 2022). Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan pola perilaku serta keyakinan dalam Tradisi Perang Timbung. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam tradisi tersebut. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling (Sugiyono, 2013), dengan mempertimbangkan pihak yang paling memahami objek penelitian. Kriteria informan meliputi masyarakat yang mengetahui nilai Kebajikan kewarganegaraan dalam tradisi, serta tokoh adat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Informan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu informan kunci, utama, dan pendukung. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari arsip desa, dokumen adat, catatan sejarah, penelitian terdahulu, serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pejanggik, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali makna Tradisi Perang Timbung, nilai-nilai kebajikan kewarganegaraan yang terkandung, serta perannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Observasi

dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif guna mengamati langsung proses pelaksanaan tradisi, interaksi sosial, serta manifestasi nilai Kebajikan kewarganegaraan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui arsip, foto, dan literatur terkait. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi data. Analisis data menggunakan model (Miles *et al.*, 2014) yang meliputi tiga tahapan. Pertama, kondensasi data melalui pemilihan dan penyederhanaan informasi penting. Kedua, penyajian data dalam bentuk deskriptif untuk memudahkan pemahaman pola dan makna. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berulang hingga diperoleh hasil yang valid dan menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Implementasi Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan politik di SMA Sayyid Yusuf Talango dilakukan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila yang terintegrasi dalam materi demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta partisipasi politik. Guru telah menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus dan modul ajar yang memuat nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan sebagai bagian dari tujuan pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga melalui berbagai aktivitas yang memberikan pengalaman demokrasi kepada siswa. Kegiatan tersebut meliputi diskusi kelompok, studi kasus, musyawarah kelas, presentasi kelompok, serta simulasi pemilihan ketua OSIS. Melalui kegiatan tersebut siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menghargai pandangan orang lain, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama.

Guru Pendidikan Pancasila menjelaskan bahwa pembelajaran politik tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam materi Pendidikan Pancasila yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, konstitusi, serta partisipasi warga negara. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan diskusi dan pemecahan masalah dibandingkan pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah.

Meskipun demikian, implementasi pendidikan politik belum sepenuhnya optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran masih terbatas dan metode partisipatif belum diterapkan secara konsisten pada seluruh materi pembelajaran. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung dan akses informasi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pendidikan politik di sekolah.

2. Tingkat Pemahaman Politik Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman politik siswa. Perubahan tersebut terlihat pada aspek pengetahuan, sikap, dan partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan demokrasi sekolah.

Pada aspek kognitif, sebagian besar siswa telah memahami konsep dasar demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan bermasyarakat. Siswa mampu menjelaskan makna demokrasi, fungsi pemilu, serta pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan.

Pada aspek afektif, siswa menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat serta memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya menghargai hak orang lain. Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa mulai memahami pentingnya musyawarah

dalam menyelesaikan permasalahan bersama serta menunjukkan sikap yang lebih toleran dalam kegiatan diskusi kelas.

Sementara itu, pada aspek partisipatif, peningkatan pemahaman politik terlihat dari keterlibatan siswa dalam organisasi sekolah, kegiatan OSIS, pemilihan ketua OSIS, musyawarah kelas, dan berbagai kegiatan yang melibatkan proses pengambilan keputusan bersama. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai praktik demokrasi di lingkungan sekolah.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi siswa belum sepenuhnya merata. Sebagian siswa masih menunjukkan sikap pasif dalam kegiatan diskusi dan belum memiliki keberanian yang cukup untuk menyampaikan pendapat di depan forum.

3. Hambatan dalam Penguatan Pendidikan Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan politik di SMA Sayyid Yusuf Talango masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural.

Hambatan struktural berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pembelajaran, akses teknologi informasi, serta ketersediaan sumber belajar yang mendukung pendidikan politik. Kondisi geografis Talango sebagai wilayah kepulauan menyebabkan akses terhadap informasi politik dan sumber belajar menjadi relatif terbatas dibandingkan sekolah yang berada di wilayah perkotaan.

Selain hambatan struktural, penelitian juga menemukan hambatan kultural yang berasal dari rendahnya minat sebagian siswa terhadap isu-isu politik. Sebagian siswa masih memandang politik sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka dan identik dengan konflik atau perebutan kekuasaan. Persepsi tersebut memengaruhi tingkat keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan politik.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih demokratis melalui kegiatan organisasi siswa, musyawarah kelas, dan berbagai program yang mendorong partisipasi aktif siswa. Guru juga berupaya mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

4. Temuan Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, ditemukan empat temuan utama.

Pertama, pendidikan politik lebih efektif ketika dikaitkan dengan pengalaman demokrasi yang nyata. Siswa lebih mudah memahami konsep demokrasi, partisipasi, dan tanggung jawab warga negara melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan seperti pemilihan ketua OSIS, musyawarah kelas, dan diskusi kelompok.

Kedua, pengalaman demokrasi sekolah menjadi media utama dalam pembentukan pemahaman politik siswa. Organisasi siswa, kegiatan musyawarah, dan proses pemilihan pemimpin sekolah memberikan ruang bagi siswa untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi secara langsung.

Ketiga, kondisi geografis kepulauan memengaruhi perkembangan wawasan politik siswa. Keterbatasan akses informasi dan sumber belajar menjadi tantangan dalam penguatan pendidikan politik, namun budaya lokal seperti gotong royong dan musyawarah menjadi modal sosial yang mendukung pembentukan karakter demokratis siswa.

Keempat, guru menjadi faktor utama dalam keberhasilan pendidikan politik. Kemampuan guru dalam menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif, dialogis, dan kontekstual terbukti berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan pemahaman politik siswa selama proses pembelajaran berlangsung.

Pembahasan

1. Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik di SMA Sayyid Yusuf Talango diimplementasikan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila yang terintegrasi dalam materi demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta partisipasi politik. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik tidak diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan menjadi bagian integral dari Pendidikan Pancasila sebagai sarana pembentukan warga negara yang demokratis. Dalam teori civic education, Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai wahana untuk membentuk civic knowledge, civic skills, dan civic disposition yang diperlukan dalam kehidupan demokrasi (Wahyuni, 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan Almond dan Verba dalam teori political socialization yang menyatakan bahwa sekolah merupakan agen sosialisasi politik yang penting dalam membentuk orientasi politik generasi muda (Almond & Verba, 1963).

Pelaksanaan pendidikan politik melalui diskusi kelompok, musyawarah kelas, presentasi, dan simulasi pemilihan ketua OSIS menunjukkan bahwa proses pembelajaran telah mengarah pada pendekatan partisipatif. Dalam teori democratic citizenship education, pengalaman langsung dalam praktik demokrasi dianggap lebih efektif dibandingkan sekadar penyampaian materi secara teoritis karena peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengalami dan merefleksikan nilai-nilai demokrasi secara nyata (Rijal *et al.*, 2025). Pendekatan ini juga sejalan dengan teori konstruktivisme Vygotsky yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial dan pengalaman belajar yang bermakna (Vygotsky, 1978).

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengalaman demokrasi sekolah menjadi media utama dalam pembentukan kesadaran politik siswa. Kegiatan pemilihan ketua OSIS, organisasi siswa, dan musyawarah kelas memberikan ruang bagi siswa untuk belajar tentang representasi, kepemimpinan, partisipasi, dan pengambilan keputusan kolektif.

Dalam perspektif teori demokrasi partisipatif, partisipasi dalam institusi sosial seperti sekolah merupakan latihan awal bagi warga negara untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik yang lebih luas (Pateman, 1970). Penelitian Rahman dan Suharno juga menegaskan bahwa pendidikan politik menjadi lebih efektif ketika didukung oleh praktik demokrasi yang nyata di lingkungan sekolah karena siswa dapat menghubungkan konsep politik dengan pengalaman empiris mereka sendiri (Rahman & Suharno, 2023).

Namun demikian, implementasi pendidikan politik belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan penggunaan media pembelajaran dan belum konsistennya penerapan metode partisipatif pada seluruh materi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan politik tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh kompetensi pedagogik guru dalam merancang pembelajaran yang dialogis, kontekstual, dan inovatif. Dalam teori pembelajaran demokratis John Dewey, pendidikan seharusnya menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi aktif dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta pengambilan keputusan (Dewey, 1916). Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik memerlukan inovasi pembelajaran yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan karakteristik generasi muda.

2. Penguatan Pemahaman Politik Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman politik siswa pada aspek kognitif, afektif, dan partisipatif. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik tidak hanya menghasilkan pengetahuan

politik (political knowledge), tetapi juga membentuk sikap politik (political attitude) dan perilaku partisipatif (political participation). Dalam teori kompetensi kewarganegaraan, ketiga aspek tersebut merupakan indikator utama keberhasilan pendidikan politik karena tujuan akhirnya adalah membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab (Branson, 1998).

Pada aspek kognitif, siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, fungsi pemilu, serta pentingnya partisipasi politik. Temuan ini menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila berperan sebagai instrumen penguatan literasi politik generasi muda. Dalam teori political literacy, warga negara yang memiliki literasi politik yang baik akan lebih mampu memahami sistem politik, mengevaluasi informasi politik, dan mengambil keputusan secara rasional dalam kehidupan demokrasi (Crick, 2004).

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa literasi politik yang baik berkorelasi positif dengan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu publik dan proses politik (Anugrah *et al.*, 2024). Pada aspek afektif, siswa menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat, menghargai hak orang lain, serta memiliki kesadaran mengenai pentingnya musyawarah. Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan politik telah berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter demokratis. Dalam teori pendidikan karakter demokratis, nilai-nilai seperti toleransi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan fondasi penting bagi terciptanya budaya demokrasi yang sehat (Gutmann, 1999).

Penelitian Anugrah *et al.* (2024) juga menegaskan bahwa karakter demokratis tidak hanya ditandai oleh pemahaman konsep demokrasi, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam mengelola perbedaan secara konstruktif dan menjunjung tinggi nilai musyawarah.

Pada aspek partisipatif, peningkatan pemahaman politik terlihat dari keterlibatan siswa dalam organisasi sekolah, pemilihan ketua OSIS, musyawarah kelas, dan berbagai kegiatan pengambilan keputusan bersama. Temuan ini memperkuat teori partisipasi politik yang menyatakan bahwa partisipasi warga negara tidak muncul secara spontan, melainkan terbentuk melalui proses pembelajaran dan pengalaman sosial yang berkelanjutan (Verba & Nie, 1972). Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membangun kesiapan siswa sebagai pemilih pemula yang memiliki kesadaran politik, tanggung jawab sosial, dan kemampuan mengambil keputusan secara rasional.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi siswa belum sepenuhnya merata karena sebagian siswa masih bersikap pasif dalam diskusi dan belum berani menyampaikan pendapat di depan forum. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai demokrasi masih memerlukan penguatan, terutama dalam membangun rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi politik siswa. Dalam teori efikasi politik (political efficacy), individu yang merasa memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses politik akan lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi (Bandura, 1997). Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Pancasila perlu dirancang lebih inklusif dan memberi ruang yang lebih luas bagi seluruh siswa untuk berpartisipasi secara aktif.

3. Hambatan Penguatan Pendidikan Politik di Wilayah Kepulauan

Penelitian ini menemukan bahwa penguatan pendidikan politik di SMA Sayyid Yusuf Talango menghadapi hambatan struktural dan kultural. Hambatan struktural berkaitan dengan keterbatasan fasilitas pembelajaran, akses teknologi informasi, dan ketersediaan sumber belajar yang mendukung pendidikan politik. Kondisi geografis Talango sebagai wilayah kepulauan menyebabkan akses terhadap informasi politik dan sumber belajar menjadi relatif terbatas dibandingkan sekolah di wilayah perkotaan. Dalam teori kesenjangan digital (digital divide), perbedaan akses terhadap teknologi dan informasi dapat memengaruhi kualitas pendidikan serta

kesempatan individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat modern (Van Dijk, 2020).

Keterbatasan akses informasi tersebut berdampak pada rendahnya peluang siswa untuk memperoleh wawasan politik yang lebih luas. Dalam era digital, kesenjangan akses informasi dapat memengaruhi kualitas literasi politik generasi muda karena mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi, berdiskusi, maupun mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu publik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa akses terhadap sumber informasi yang beragam merupakan salah satu prasyarat penting dalam pembentukan warga negara demokratis yang kritis dan partisipatif (Anugrah *et al.*, 2024).

Selain hambatan struktural, penelitian ini juga menemukan hambatan kultural berupa rendahnya minat sebagian siswa terhadap isu-isu politik. Politik masih dipersepsikan sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari dan sering diasosiasikan dengan konflik atau perebutan kekuasaan. Dalam teori budaya politik (*political culture*), orientasi masyarakat terhadap politik dipengaruhi oleh nilai, pengalaman, dan persepsi yang berkembang dalam lingkungan sosial mereka (Almond & Verba, 1963). Persepsi negatif terhadap politik dapat mengurangi motivasi individu untuk terlibat dalam aktivitas politik dan kewarganegaraan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih demokratis melalui kegiatan organisasi siswa, musyawarah kelas, dan program yang mendorong partisipasi aktif siswa. Guru juga berusaha mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa agar lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Pendekatan kontekstual ini sejalan dengan teori pembelajaran kontekstual yang menekankan pentingnya menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami (Johnson, 2002).

Menariknya, di tengah berbagai keterbatasan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa budaya lokal seperti gotong royong dan musyawarah justru menjadi modal sosial yang mendukung pendidikan politik. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi sebenarnya telah hidup dalam praktik sosial masyarakat setempat. Dalam teori modal sosial (*social capital*), nilai-nilai seperti kepercayaan, gotong royong, dan jaringan sosial dapat memperkuat partisipasi masyarakat dan mendukung perkembangan budaya demokrasi (Putnam, 1993). Dengan demikian, penguatan pendidikan politik di wilayah kepulauan tidak harus hanya bertumpu pada pendekatan formal, tetapi juga dapat dikembangkan melalui integrasi antara nilai-nilai demokrasi modern dan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan politik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Sayyid Yusuf Talango Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan dengan mengintegrasikan materi demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta partisipasi politik ke dalam proses pembelajaran. Implementasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga melalui berbagai aktivitas pembelajaran partisipatif seperti diskusi kelompok, musyawarah kelas, presentasi, dan simulasi pemilihan ketua OSIS yang memberikan pengalaman demokrasi secara langsung kepada siswa. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik yang mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab, dan partisipasi kewarganegaraan kepada peserta didik.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila terbukti memberikan kontribusi terhadap penguatan pemahaman politik siswa pada aspek kognitif, afektif, dan partisipatif. Pada aspek kognitif, siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep demokrasi, hak dan kewajiban warga

negara, serta pentingnya partisipasi politik dalam kehidupan bermasyarakat. Pada aspek afektif, siswa menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat, menghargai hak orang lain, dan memahami pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Sementara itu, pada aspek partisipatif, siswa mulai terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan demokrasi di lingkungan sekolah seperti organisasi siswa, musyawarah kelas, dan pemilihan ketua OSIS sebagai bentuk praktik demokrasi yang nyata.

Meskipun demikian, implementasi pendidikan politik di SMA Sayyid Yusuf Talango masih menghadapi sejumlah hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Hambatan struktural meliputi keterbatasan fasilitas pembelajaran, akses teknologi informasi, dan sumber belajar yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah kepulauan. Sementara itu, hambatan kultural terlihat dari masih rendahnya minat sebagian siswa terhadap isu-isu politik serta adanya persepsi bahwa politik merupakan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Namun demikian, keberadaan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah menjadi modal sosial yang mendukung penguatan pendidikan politik dan pembentukan karakter demokratis siswa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui pengalaman demokrasi yang nyata, didukung oleh lingkungan sekolah yang demokratis, serta difasilitasi oleh guru yang mampu menerapkan pembelajaran partisipatif, dialogis, dan kontekstual. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran politik, literasi politik, serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan pendidikan politik di sekolah tidak hanya penting untuk meningkatkan pemahaman politik siswa, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun warga negara yang demokratis, kritis, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada SMA Sayyid Yusuf Talango, Kabupaten Sumenep, beserta seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Yogyakarta atas dukungan akademik yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alscher, P. (2022). Political education and democratic citizenship in contemporary society. *Journal of Social Science Education*, 21(2), 1–15. <https://doi.org/10.1037/xge0001766>
- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Princeton University Press.
<https://www.jstor.org/stable/j.ctt183pnr2>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W.H. Freeman.
- Bowyer, B., & Kahne, J. (2020). The digital dimensions of civic education: Assessing the effects of learning opportunities. *Social Science Computer Review*, 38(1), 39–55. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2020.101162>
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education*. Center for Civic Education.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

- Denis Irwandi, D., Sunarso, S., & Marzuki, M. (2023). Penguatan literasi politik siswa melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di era digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(2), 145–158.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.
- Firdaus, M. (2023). Tantangan pendidikan di wilayah kepulauan dan implikasinya terhadap akses informasi peserta didik. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 8(1), 44–57.
- Gutmann, A. (1999). *Democratic education*. Princeton University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7sdfv>
- Johnson, E. B. (2002). *Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay*. Corwin Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, M., Suryadi, K., & Winataputra, U. S. (2019). Pendidikan politik sebagai instrumen pembentukan warga negara demokratis. *Jurnal Civics*, 16(2), 112–124.
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Rahman, A., & Suharno, S. (2023). Praktik demokrasi sekolah dalam penguatan pendidikan politik siswa. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(1), 45–56.
- Rijal, M., Hidayat, T., & Lestari, N. (2025). Internalisasi nilai demokrasi melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. *Jurnal Kajian Pendidikan*, 9(1), 33–48.
- Saputri, N., Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2024). Pendidikan politik dan penguatan partisipasi demokratis peserta didik di sekolah menengah. *Jurnal Civic Education*, 7(1), 78–92.
- Sati, A., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter demokratis peserta didik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 215–224.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. Polity Press.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. Harper & Row.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Wahyuni, D. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai penguatan civic education dan literasi politik siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 29(1), 77–89.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.
- Zulfaida, N., & Arifin, M. (2025). Kesenjangan akses informasi politik pada masyarakat kepulauan dan dampaknya terhadap pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Politik*, 10(1), 21–35.